

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana yang tercantum pada alinea ke 4 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 untuk mencapai kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa maka pemerintah perlu adanya rencana kerja yang diperhitungkan dengan keuangan yang disusun secara sistematis, dimana mencakup rencana penerimaan dan rencana pengeluaran untuk satu tahun anggaran yang berfungsi untuk mengelola suatu pemerintahan yang efektif dalam mencapai tujuannya.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Salah satu unsur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah anggaran pendapatan negara dan hibah, yang diperoleh dari : penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah dari dalam negeri dan luar negeri. Dikutip dari jurnal internasional (Sharma, 2015) mobilisasi pendapatan melalui penerimaan negara bukan pajak adalah faktor kunci untuk pembangunan.

Keuangan Negara yang baik akan menggambarkan keadaan suatu pemerintahan yang baik pula. Pemungutan yang dilakukan suatu negara di samping sebagai sumber penerimaan dalam negeri juga mempunyai peranan fungsi alokasi, fungsi distribusi dan stabilisasi (Natalia, 2012). Pendapatan negara Indonesia yang terbesar memang berasal dari pajak namun, tidak semua orang mengetahui bahwa

Penerimaan Negara Bukan Pajak juga merupakan penyumbang pendapatan negara walaupun hasil yang diperoleh tidak sebesar pendapatan yang diterima dari pajak dan cukai (Amallia, 2015). Hal ini dikarenakan, pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak masih kurang dioptimalkan oleh pemerintah sehingga kontribusinya terhadap anggaran negara kurang maksimal.

Hal ini dibuktikan dengan data yang didapat dari Kementerian Keuangan bahwa dalam APBN 2018 yakni Penerimaan Perpajakan sebesar Rp 1.618,1 Triliun sedangkan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 275,4 Triliun. (www.kemenkeu.go.id, 07.05.2018).

Berdasarkan data diatas memperlihatkan perbandingan antara penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak yang menunjukkan pendapatan negara sangat didominasi oleh penerimaan perpajakan. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan negara dari sektor PNBP masih sangat kurang dalam kontribusi pendapatan negara.

Menurut Indrawati (PNBP Awards, 2017) mengatakan, dalam 10 tahun terakhir, kontribusi PNBP terhadap penerimaan negara mencapai 25 persen. Namun, lanjut Indrawati, yang terpenting dari PNBP ini bukan sekedar seberapa besar sumbangan PNBP bagi negara, melainkan timbal balik yang dirasakan masyarakat dari uang yang dibayarkan untuk PNBP. Sementara itu, Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Askolani mengatakan, peran PNBP sangat penting bagi penerimaan negara secara keseluruhan. Sebab PNBP memberikan sumbangan cukup signifikan karena berasal dari berbagai sumber. Beliau juga mengatakan bahwa kontribusi PNBP ini penting bagi penerimaan. Oleh sebab itu, pada tahun

2018, PNBPN ditargetkan sebesar Rp 875 triliun dari total 1.890 triliun (penerimaan negara).

Menurut Indrawati (Penyerahan Hasil Lelang dan Penjualan Sukarela Koleksi Pribadi Ibu Negara, 2018) menghimbau kepada masyarakat agar mulai menggunakan mekanisme lelang baik untuk kepentingan komersial maupun kegiatan sosial. Beliau berharap bahwa kegiatan yang berhubungan dengan lelang ini akan terus bisa dikenalkan dan dipublikasikan kepada masyarakat. Indrawati merasa dengan adanya munculnya lelang yang cukup memberikan berita sekarang mulai ada ketertarikan untuk melakukan lelang.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Lelang. Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang.

Menurut Donnelly (2011), efektivitas merupakan suatu standar akan terpenuhinya mengenai sasaran dan tujuan yang akan dicapai serta menunjukan pada tingkat sejauh mana organisasi, program/kegiatan melaksanakan fungsi-fungsinya secara optimal. Dalam penelitian ini dibuktikan dengan anggaran dan realisasi bea lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pangkalpinang.

Penatausahaan uang lelang telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER-07/KN/2012 tentang Penatausahaan Hasil Pengurusan Piutang Negara dan Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Menurut Undang-undang nomor 20 tahun 1997 tentang Penerimaan

Negara Bukan Pajak disebutkan negara mempunyai hak menetapkan dan memungut Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 102/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. KPKNL mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dibidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang. Di Indonesia ada 17 Kanwil yang membawahi 89 KPKNL. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) adalah instansi vertikal Direktorat Jendral Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, sedangkan Kantor Wilayah sendiri bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang bernaung dibawah Kementerian Keuangan.

Alasan penulis melakukan penelitian pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pangkalpinang adalah karena Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pangkalpinang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dibidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang. Dalam hal ini, penulis memilih bea lelang untuk diteliti dikarenakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, bea lelang dikenakan kepada Penjual dan/atau pembeli atas setiap pelaksanaan lelang yang merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Berangkat dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melalukan penelitian di salah satu unit operasional yang berada di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI yaitu Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pangkalpinang dengan judul “**Analisis Efektivitas**

Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Pangkalpinang”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini dapat dirumuskan:

1. Bagaimana Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) ?
2. Bagaimana tingkat efektivitas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) ?

1.3. Batasan Masalah

Adapun yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini yaitu untuk menganalisis efektivitas dan penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kantor Pelayanan Kekayaan dan Negara (KPKNL) Pangkalpinang. Maka peneliti hanya membahas sesuai dengan identifikasi masalah pada judul penelitian ini.

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas penatausahaan penerimaan negara bukan pajak pada kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang pangkalpinang :

- a. Untuk menganalisis tingkat efektivitas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pangkalpinang

- b. Untuk menganalisis penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pangkalpinang

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Kontribusi Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya konsep atau teori yang menyokong perkembangan tentang penerimaan negara bukan pajak, khususnya pada kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang, serta dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian lain yang sejenis.

2. Kontribusi Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berarti bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam pengambilan kebijakan mengenai penerimaan negara bukan pajak di Indonesia.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dibuat dengan tujuan untuk memberikan gambaran garis besar dan menjelaskan gambaran skripsi ini hingga dapat memberikan hubungan antara satu bab lainnya. Dalam penelitian ini sistematika penulisan yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini akan menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

2. BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini akan menguraikan tentang teori-teori yang berkaitan langsung dengan masalah yang diteliti, menjelaskan penelitian terdahulu, serta rerangka pemikiran.

3. BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini akan menguraikan tentang metode penelitian yang meliputi rancangan penelitian, pemilihan lokasi dan situs penelitian, sumber data, pengumpulan data, instrumen penelitian dan analisis data.

4. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang penyajian data, menganalisis, mendeskripsikan data yang telah diperoleh dari wawancara serta observasi.

5. BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran yang ditujukan kepada berbagai pihak yang berkepentingan.